

Tawarkan Penyelesaian Non Yudisial

Rakyat Merdeka - 10 JAN '18.



Prasetyo Putus Asa Tangani Kasus HAM Berat Masa Lalu

Kejaksaan Agung (Kejagung) masih kesulitan mencari bukti dan pelaku maupun saksi-saksinya dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menepis anggapan bahwa lembaga nya enggan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

IA menilai, penanganan kasus tersebut sangat sulit karena peristiwa terjadi puluhan tahun silam. "Saya pahami siapa pun yang melakukan penyidikan akan kesulitan menemukan bukti yang dibutuhkan," ujar Pras di Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.

Dalam hal ini, kata dia, Komnas HAM yang berwenang melakukan penyelidikan. Setelah itu diserahkan ke Kejaksaan untuk ditingkatkan ke penyidikan. Namun, dalam proses meneliti berkas itu, jaksa kerap kesulitan mencari bukti. Pelaku maupun saksi-saksinya juga belum tentu masih hidup.

"Kejaksaan sebagai peneliti akan sulit meningkatkan ke penyidikan. Jadi bukan berarti kami melantarkan perkara ini," kata Pras.

Oleh karena itu, kata Pras, lembaga nya menawarkan penyelesaian kasus secara non-yudisial atau rekonsiliasi. Menurut dia, rekonsiliasi merupakan cara paling tepat menuntaskan kasus HAM berat masa lalu. Jika diselesaikan secara yudisial, ia meyakini era mana pun yang memerintah akan sulit menanganinya.

Pras meminta pengertian se-



Muhammad Prasetyo

mua pihak mengenai kesulitan yang dihadapi kejaksaan. "Itu akan dibawa ke pengadilan. Kalau dipaksakan, toh hasilnya mungkin akan mengecewakan," kata Pras.

Anggota Amnesty International Todung Mulya Lubis mengatakan, pemerintahan dinilai masih belum siap menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Ia mengatakan kondisi politik Indonesia belum memungkinkan untuk itu.

"Kalau saya lihat memang kondisi politik Indonesia masih belum siap untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Mungkin butuh waktu beberapa dekade lagi," kata Todung.

Todung mengatakan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu adalah utang kepada republik dan rakyat yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus membayar utang tersebut.

Pada saat kampanye, seluruh kandidat telah berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Oleh karena itu, Todung pun berharap keberadaan Amnesty International Indonesia bisa mendorong realisasi janji kampanye tersebut.

"Karena kalau tidak (diselesaikan), akan selalu ada yang merasa keadilannya dirampas, haknya dilanggar dan tidak mendapat perbaikan," imbuh Todung.

Todung melihat, perhatian pemerintah terhadap isu-isu HAM masih harus ditingkatkan. Todung tidak ingin jika penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu sampai harus memakan waktu hingga ratusan tahun lamanya.

"Di Rwanda persoalan pelanggaran HAM masa lalu kalau diselesaikan secara prosedur hukum normal, itu akan butuh waktu 150 tahun. Di Indonesia juga akan butuh waktu ratusan tahun untuk menyelesaikan (jika dengan cara sama)," katanya. ■ QAR/NET